

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Islam atau disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau Bank tanpa bunga adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang dimana Bank Syariah dalam lembaga keuangan yang usaha pokoknya untuk diberikan didalam pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam proses pembayaran dan peredaran uang yang dioperasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam¹

Produk perbankan syariah dengan sistem bagi hasil dapat berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun penyaluran dana atau pembiayaan (financing). Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang cukup banyak diminati adalah produk jual beli dengan akad Murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli komoditas tertentu dengan cara penjual menjelaskan kepada pembeli tentang harga jual yang terdiri dari harga perolehan dan keuntungan (margin) yang diambil penjual kemudian pembeli menyetujui harga jual tersebut.² Konsep murabahah secara sederhana merupakan bentuk jual- beli yang ditambah dengan komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal barang ditambahkan dengan keuntungan

¹ Setia Budhi Wilardjo, September 2004 ± Maret 2005, Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia, Value Added, Vol. 2, No. 1.

² Ir. Adiwarman A. Karim, 2013, Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan" hal. 113

sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pengertian Akad murabahah secara lengkap merupakan akad jual-beli yang memiliki spesifikasi tertentu, yang artinya keharusan adanya penyampaian harga semula harus secara jujur oleh penjual kepada calon pembeli sekaligus keuntungan yang diinginkan oleh penjual. Keuntungan yang diinginkan oleh penjual tersebut harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal spesifik seperti inilah yang membedakan *murabahah* dengan jual beli pada umumnya. Dari definisi bahwa dapat dipahami dalam murabahah, pola pembayaran bisa dengan cara diangsur, *cash* atau tangguh. Selain itu, ketika akad *murabahah* sudah terjadi tetapi pembayaran belum dilakukan, maka hubungan penjual dan pembeli menjadi hubungan hutang piutang. Pembeli mempunyai hutang kepada penjual yang harus diselesaikan (dilunasi) maka terdapat atau munculnya sebuah konsep dengan menciptakan sebuah aplikasi pembiayaan dengan akad Murabahah yang sederhana dan memudahkan dalam penanganan administrasi di bank syariah merupakan faktor utama bank Syariah di Indonesia lebih banyak menerapkan prinsip murabahah dalam pembiayaan. Hal ini dikarenakan praktik murabahah menggunakan sistem cicilan berkala (*installment*).³

Dalam murabahah berdasarkan pesanan yaitu bank melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari nasabah yang murabahah itu berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Didalam bank syariah 6u89 umumnya

³ Yenti Afrida, Juli - Desember 2016, Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 1, No. 2, hal. 3

mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pada saat pembelian barang bagi nasabah yang perekonomiannya kurang mencukupi untuk membayar.

Perspektif Islam tentang murabahah dalam Al-Qur'an dan Hadist yang pengertian murabahah yaitu bagian dari jual beli dan sistem ini didominasi produk – produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam jual beli merupakan salah satu sarana tolong – menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah Swt.

Surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang – orang yang beriman jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu.”*

Dalam surah An- Nisa ayat 29, Allah Swt menyuruh kepada seluruh kaum mukmin dengan tidak memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, kecuali telah adanya sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain yang akibatnya

kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan – larangan Allah dan maksiat – maksiat kepadanya.⁴

Asas yang menjadi landasan hukum murabahah adalah yaitu:

1. Asas konsensual yang berlandaskan pada kaidah hukum Islam yang pada dasarnya membahas perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. Asas janji itu mengikat berlandaskan pada perintah dalam Al Qur'an agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Di antara ayat dan hadits dimaksud adalah penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya .
2. Asas Kemaslahatan dimaksudkan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan yang memberatkan (masyaqqah).
3. Asas Amanah mengandung arti bahwa para pihak yang melakukan akad harus memiliki itikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Dalam perjanjian Islam dituntut adanya amanah misalnya memegang rahasia, atau memberikan informasi yang sesungguhnya, tidak bohong.⁵

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

⁴ Bagya Agung Prabowo, 2009, Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia), JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 16 JANUARI 2009: 106 – 126. Hal. 108.

⁵ Neni Sri Imaniyati, 2011, Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah, MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011), hal. 151-156

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), dan menurut Prinsip Syariah menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada Penjelasan Umum dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil (mudharabah).⁶

Menurut Pasal 1 butir (25) Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut Undang - Undang Perbankan Syariah) yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan

⁶ Sovia Hasanah S.H., Dasar Hukum Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah, Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598a6c8192ed4/dasar-hukum-prinsipbagi-hasil-dalam-perbankan-syariah>, diakses pada 15 Oktober 2020, Pukul 13.00 WIB.

yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah, dan musyarakah, sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.⁷

Dengan adanya asas-asas atau prinsip-prinsip Murabahah tersebut maka akibat hukum Murabahah itu dimuat secara sah, sehingga akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu dalam Bank Syariah itu sendiri. Dari uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH DALAM PERBANKAN SYARIAH”(Studi Kasus PUTUSAN Nomor 1024 K/Pdt/2016)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa perbedaan antara Akad Murabahah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah di bank syariah ?
2. Bagaimana akibat hukum pada saat Akad Musyarakah Mutanaqisah apabila terjadi wanprestasi?

⁷ Abdul Rasyid, 2018, Kelembagaan Industri Perbankan Syariah, diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/28/kelembagaan-industri-perbankan-syariah/> , diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 16.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui perbedaan Akad Murabahah dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang diberikan oleh para pihak apabila dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah di dalam putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016 pihak debitur yang mengalami wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum Indonesia dan khususnya hukum ekonomi syariah, dalam mengenai pelaksanaan pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan wawasan ilmu pengetahuan dalam praktek pelaksanaan pembiayaan murabahah didalam perbankan syariah

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran memuat uraian tentang teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau referensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan kemudian dalam menganalisis hasil penelitian.⁸

Murabahah dalam perbankan adalah akad jual beli barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pengertian Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) yang kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang kegiatannya adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁹

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), dan menurut Prinsip Syariah

⁸ Absori dan Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, Pedoman Penyusunan Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 18

⁹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, 2013, Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta: Salemba Empat, hlm. 167

menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada Penjelasan Umum dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah. Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil (mudharabah).¹⁰

Pengertian Akad yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 13 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah:

*“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”.*¹¹

Fungsi dari adanya Bank Syariah berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang disebutkan bahwa Bank Syariah menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dari Bank Syariah, serta Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial yaitu dalam bentuk lembaga baitulmal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang

¹⁰Sovia Hasanah S.H., Dasar Hukum Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598a6c8192ed4/dasar-hukum-prinsipbagi-hasil-dalam-perbankan-syariah>, diakses pada 20 Oktober 2020, Pukul 11.00 WIB.

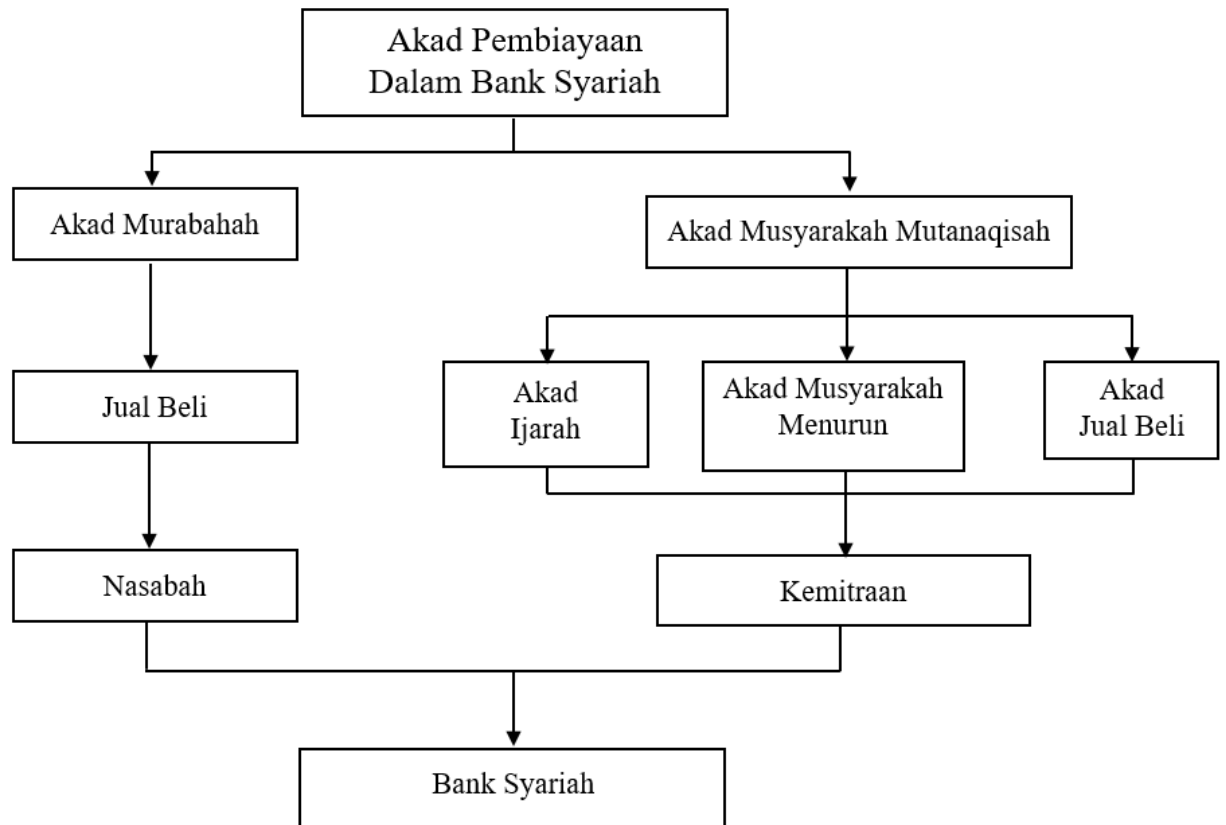
¹¹ Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

disalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat serta Bank Syariah dapat juga menyalurkan dana sosial yang berasal dari wakaf dan menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). Menurut M. NurRianto Al-Arif pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendirimaupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹² Sedangkan menurut dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berbunyi:

*”Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”*¹³

¹² Arif Effendi, Oktober 2014, Industri Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Vol. 1 No. 2.

¹³ Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisis¹⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan

¹⁴ Khudzaifah Dimyati, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3.

penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bahannya berdasarkan dari bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya adalah mempelajari dan membaca bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sehingga, dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dimana jawaban yang dihadapkan adalah *right, inappropriate, atau wrong*.¹⁶ Sehingga dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan pendekatan dengan menganalisis terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

¹⁵ Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, Hlm. 66.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2014, hal: 34-35

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25

Bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena untuk menguraikan dan menganalisis tentang Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya :

- a) Landasan syariah: Al-Qur'an dan Hadist
- b) Undang – Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- c) Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah
- d) Dewan Syariah Nasional No. 04/DSM-MUI/IV/2000 Tentang Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah
- e) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

2) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum dan jurnal-jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain..

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari Jurnal dan Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016

4. Studi Penelitian

Menggunakan kasus didalam Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016

a. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah di PT Bank Bukopin Syariah Cabang Surakarta.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lembar isi Undang – Undang yang berhubungan dengan Akad Pembiayaan Murabahah dan Akad Musyarakah Mustanaqisah Metode Pengumpulan Data melalui Jurnal dan Putusan Nomor 1024 K/Pdt/2016

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan dari peraturan perundang – undangan , publikasi , hasil penelitian, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian .

2) Mengambil Putusan

Didalam Penelitian ini menggunakan atau mengambil kasus yang terdapat didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari wawancara dan data yang diterima.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam melakukan penulisan hukum ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Bank Syariah
- B. Konsep Pelayanan Dalam Bank Syariah
- C. Pengertian Murabahah dan Musyarakah Mutanaqisah Secara Umum
 - 1. Pengertian Murabahah Secara Umum
 - 2. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah Secara Umum
- D. Pengertian Pembiayaan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mustanaqisah Dalam Bank Syariah
 - 1. Pengertian Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Bank Syariah
 - 2. Pengertian Pembiayaan Akad Musyarakah Mustanaqisah Dalam Bank Syariah

E. Asas–Asas Dalam Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mustanaqisah

1. Asas – Asas Dalam Akad Murabahah
2. Asas – Asas Akad Musyarakah Mustanaqisah

F. Prinsip – Prinsip dalam Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mustanaqisah

1. Prinsip – Prinsip Akad Murabahah
2. Prinsip – Prinsip Akad Musyarakah Mustanaqisah

G. Macam – Macam Akad Pembiayaan Murabahah dan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

1. Macam – Macam Akad Pembiayaan Murabahah
2. Macam – Macam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

H. Akibat apabila nasabah melanggar dalam pembiayaan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah

1. Akibat apabila nasabah melanggar dalam pembiayaan Akad Murabahah
2. Akibat apabila nasabah melanggar dalam pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah

I. Syarat – Syarat Bertransaksi Dalam Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah

1. Syarat – Syarat Bertransaksi Dalam Akad Murabahah
2. Syarat – Syarat Bertransaksi Dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah

J. Resiko Dalam Melakukan Pembiayaan Dalam Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah

1. Resiko Dalam Melakukan Pembiayaan Dalam Akad Murabahah
2. Resiko Dalam Melakukan Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perbedaan Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah
2. Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah
3. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Dalam Akad Murabahah
4. Aplikasi Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Perbankan Syariah
5. Kelebihan dan Kelemahan dalam Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ):
6. Menguraikan tentang Penerapan Akibat Hukum pada saat Akad Murabahah dan Akad Musyarakah Mutanaqisah Apabila Terjadi Wanprestasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1024 K/Pdt/2016)

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA